

LPPD

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2018**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya semata, akhirnya Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah dan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi Gubernur Kalimantan Utara dan Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk lebih mempertajam dan mengetahui keberhasilan pembangunan daerah, maka dipandang perlu untuk melengkapi LPPD dengan Suplemen LPPD yang terdiri dari 3 Lampiran yaitu data umum perikanan Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Capaian Kinerja.

Disadari secara substansi, redaksional maupun outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini.

Kepala Dinas

Ir. H. Amir Bakri, MP
NIP. 19640205 199403 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum	4
C. Potensi Unggulan Secara Umum.....	5
D. Kondisi Ekonomi	6
BAB. II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD).....	7
A. Visi dan Misi.....	7
B. Starategi Kebijakan Daerah.....	8
C. Prioritas Daerah	8
BAB.III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.....	9
A. Urusan Konkuren	9
a. Ringkasan Urusan Pilihan	10
1. Organisasi	10
2. Program dan Kegiatan	11
3. Tingkat Pencapaian Standar Minimal.....	12
4. Jumlah Pegawai, kualifikasi Pendidikan pangkat dan golongan, jumlah penjabat struktural dan fungsional.	12
5. Alokasi dan realisasi anggaran	15
6. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah	18
7. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan (lengkap, mencukupi atau lainnya	18

8. Permasalahan dan solusinya	21
B. Indikator Kinerja Kunci	21
1. Tataran Pengambil Kebijakan	23
2. Tataran Pelaksana Kebijakan	23
1) Administrasi Umum (8 Aspek) IKK. 1.2	23
2) Tataran Pelaksana Kebijakan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pilihan IKK. 1.3	30
BAB. IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018	31
BAB. VII PENUTUP	33
Lampiran	
1. Data Umum Dinas Kelautan dan Perikanan (IKK.1.1)	
2. Data Pendukung form isian IKK 1.2 Aspek I~ Aspek ke 8	
3. Data Pendukung form isian IKK 1.3(Produksi Perikan dan konsumsi ikan)	

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
10. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 112 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

B. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Provinsi Kalimantan Utaramemiliki luas wilayah adminsitratif yaitu $\pm 75.467,70 \text{ Km}^2$, terdiri dari :

- a. Kabupaten Bulungan : $\pm 13.925,72 \text{ Km}^2$
- b. Kabupaten Nunukan : $\pm 13.841,90 \text{ Km}^2$
- c. Kabupaten Malinau : $\pm 42.620,70 \text{ Km}^2$
- d. Kabupaten Tana Tidung : $\pm 4.828,58 \text{ Km}^2$
- e. Kota Tarakan : $\pm 250,80 \text{ Km}^2$

Saat ini memiliki 50 kecamatan dan 35 kelurahan dan 447 desa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kabupaten Bulungan : 10 Kecamatan, 7 kelurahan dan 74 desa.
- b. Kabupaten Nunukan : 16 Kecamatan, 8 kelurahan dan 232 desa.
- c. Kabupaten Malinau : 15 Kecamatan dan 109 desa.
- d. Kabupaten Tana Tidung : 5 Kecamatan dan 32 desa.
- e. Kota Tarakan : 4 Kecamatan dan 20 desa.

Provinsi Kalimantan Utara berada di Pulau Kalimantan atau yang sering disebut sebagai Pulau Borneo (*Borneo Island*), yang merupakan bagian dari wilayah Benua Asia. Berdasarkan garis bujur dan garis lintang bumi, Provinsi Kalimantan Utara terletak pada antara $3^0 12' 02'' - 3^0 46'41''$ Lintang Utara (LU) dan $116^0 42' 50'' - 117^0 49' 50''$ Bujur Timur.

Letak geostrategis Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan :

- a. Batas Utara : Negara Malaysia Bagian Sabah

- b. Batas Selatan : Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Batas Timur : Laut Sulawesi
- d. Batas Barat : Negara Malaysia Bagian Serawak

Di sebelah utara Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan wilayah Negara Bagian Sabah (Malaysia), sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia), dengan garis batas pada dua wilayah tersebut sepanjang ± 1038 km. Di sisi Timur, Provinsi Kalimantan Utara berhadapan langsung dengan laut Sulawesi, yang menjadikan provinsi ini dilewati oleh Alur Laut Kawasan Indonesia II (ALKI II) yang menjadi jalur kapal dari Kawasan Asia masuk ke Indonesia dan sebaliknya. Oleh karenanya, Provinsi Kalimantan Utara menjadi pintu gerbang wilayah utara Indonesia dan menjadikannya sebagai bagian strategis pertahanan nasional. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten yang termasuk pada wilayah pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

C. Potensi Unggulan Secara Umum

Potensi sumber daya alam Provinsi Kalimantan Utara sangat melimpah, meliputi sumber daya alam dapat pulih (renewable resources) dan sumber daya alam tak pulih (non renewable resources). Sumber daya alam pada sumber daya perikanan, dengan luas tambak Provinsi Kalimantan Utara 3.826,8 ha dan luas Perairan Kalimantan Utara adalah

7.316,43 km². Luas tutupan mangrove di wilayah pesisir Kalimantan Utara berdasarkan kategori tutupan dan Kabupaten / Kota adalah 180.981,7 (Ha)

Adapun Kegiatan penangkapan ikan di wilayah ini dilakukan masyarakat di laut dan di perairan umum, seperti sungai dan danau. Namun penangkapan ikan di laut umumnya hanya dilakukan pada wilayah laut kurang dari 12 mil laut, sehingga hasil tangkapan ikan masih rendah ($\pm$ 25.184,14 ton), dan pada umumnya kapal yang digunakan dalam penangkap ikan dibawah 10 gros ton. Sedangkan budidaya ikan dilakukan masyarakat di kolam, di tambak, baik pantai/laut, air payau atau didarat. Dengan demikian produksi perikanan masih didominasi oleh produksi ikan budidaya tertinggi adalah melalui budidaya tambak di pantai/laut (526.794,249 ton).

d. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kalimantan Utara melalui sub sector Perikanan yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) pada tahun 2018 adalah 5.167,7 milyar (sumber data BPS Kalimantan Utara).

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021: "Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara 2020 Yang Mandiri, Aman dan Damai Dengan Didukung Pemerintahan Yang bersih dan Berwibawa"

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2017-2021, dirumuskan 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Mandiri

- a) Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan.
- c) Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

2. Aman dan Damai

- a) Menjaga kedaulatan negara dan NKRI.
- b) Membangun daerah perbatasan yang aman.
- c) Memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal.

3. Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa

- a) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- b) mewujudkan pelayanan publik yang prima.
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan yang bebas suap dan gratifikasi.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (Mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi.

B. Strategi Kebijakan Daerah

Arah dan strategi kebijakan daerah sesuai dokumen RPJMD, hal ini sektor Kelautan dan Perikanan adalah dalam rangka Pembangunan ekonomi berkelanjutan dan Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan tangkap serta hasil laut lainnya
2. Meningkatkan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

C. Prioritas Daerah

Sebagaimana isu strategis yang telah tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah (RPJMD) yaitu Belum dimanfaatkannya sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal. Sementara ini sub sektor Kelautan dan perikanan menjadi andalan yang dapat untuk memacu perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara ini.

Adapun prioritas daerah melalui sector perikanan adalah sebagai :

1. Peningkatan produksi perikanan
2. Nilai ekspor Perikanan
3. Pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
4. Pengawasan sumberdaya ikan kelautan dan perikanan.

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan konkuren

Urusan konkuren yaitu urusan Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta dijadikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional

Adapun Urusan konkuren sektor kelautan dan perikanan adalah ;

Tabel. 1 UrusanKonkuren Sektor Kelautan dan Perikanan

NO	Sub Urusan	Konkuren Provinsi
1	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi. b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
2	Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikankapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT
3	Perikanan Budidaya	Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

5	Pengolahan dan Pemasaran	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
---	--------------------------	--

a. Ringkasan urusan pilihan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat diuraikan sesuai tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan.

1. Organisasi

Adapun Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
 - 1) Subbag Perencanaan dan keuangan
 - 2) Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - 1) Seksi Perencanaan Ruang Laut dan pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2) Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3) Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan
- d. Bidang Perikanan Tangkap;
 - 1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Pengakapan Ikan
 - 2) Seksi Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
 - 3) Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Sarana Prasarana
- e. Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan;

- 1). Seksi Perikanan Budidaya
- 2). Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- 3). Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- f. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 - 1) Subbag Tata Usaha
 - 2) Seksi Budidaya Laut dan Air Payau
 - 3) Seksi Perikanan Budidaya Laut
- g. UPT Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II
 - 1) Subbag Tata Usaha
 - 2) Seksi Tata Operasional
 - 3) Seksi Pengembangan
- h. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 - 1) Subbag Tata Usaha
 - 2) Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan
 - 3) Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Program dan Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2018 memiliki beberapa program dan kegiatan yang menjadi program prioritas sebagai berikut:

Tabel. 2 Program dan Kegiatan

KODE/NOMOR		DPA
		PROGRAM
15		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	1	Pembinaan kelompok masyarakatb pesisir
16		Program Pengelolaan Kelautan Laut Pesisir dan pulau-pulau kecil
	2	Kegiatan mitigasi dan adaptasi dan bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim
	3	Pengembangan dan pembinaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
	4	Rencanan Pengelolaan RPWP3K
17		Program Pengembangan kawasan Konservasi
	1	Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah
	3	Rehabilitasi dan konservasi dan sumber daya ikan di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
18		Program Pengelolaan perikanan budidaya

	1	Pembinaan dan pengembangan perikanan
	2	Perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya
21		Program pengembangan perikanan tangkap
	1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
	7	Pelayanan usaha perikanan tangkap
	8	Pengelolaan sumberdaya ikan
	10	Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan
	14	Peningkatan kompetensi keahlian nelayan
	27	Penanggulangan kemiskinan bidang perikanan tangkap
22		Program Pembangunan / pengembangan sistem informasi
	1	Peningkatan kualitas perencanaan bidang kelautan dan perikanan
	2	Peningkatan pendataan dan statistik
23		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
	14	pengembangan produk dan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	15	Akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan
25		Program Pengawasan dan Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
	1	Pembinaan kelompok masyarakat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
	2	Pengawasan sumber daya laut, kelautan dan perikanan
	3	Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan perikanan
	5	Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan

3. Tingkat Pencapaian Standar Minimal

Tingkat pencapaian kinerja sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dapat melalui Indikator Kinerja Kunci yaitu produksi perikanan dan konsumsi ikan dengan capaian indikator masing-masing Indikator sebagai berikut (terlampir IKK. 1.3)

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai 31 Desember 2018 berjumlah 49 orang.

Berikut ini disajikan Tabel Komposisi Pangkat / Golongan Pegawai DKP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018.

Tabel. 3 Data Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Pangkat/Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah
IV	III	II	I	L	P	S3	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
8	35	6	-	36	13	1	8	32	2	6	-	-	49

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018

Tabel 3.1 Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

No	Bidang	Pendidikan														Jumlah	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2			6	5
2.	Bidang Pengelolaan Ruang Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-			4	1
3.	Bidang Perikanan Tangkap	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-			5	1
4.	Bidang Perikanan Penguatan Budadaya saing Produk dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-			4	3
5.	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		1			4	1
6.	UPTD Pelabuhan Perikanan Tengayu II	-	-	-	-	4	-	1	-	4	1	1	-	-	-	10	1
7.	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-
Jumlah		-	-	-	-	6	-	2	-	20	12	6	2	1		36	13

Sumber :Data KepegawaianDinas Kelautan dan Perikanan tahun 2018

Tabel 3.2 Data Pegawai Negeri Menurut Jabatan Struktural dan fungsional tertentu DKP Prov. Kaltara

Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional Umum	
Kelautan dan Perikanan		Kelautan dan Perikanan	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
21	6	15	6

Berdasarkan hasil analisis beban kerja dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan, jika dibandingkan antara jumlah SDM yang tersedia dan tingkat pendidikan serta pelatihan teknis yang telah diikuti belum memadai. Sehingga jumlah dan kualitas SDM tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan instansi di DKP

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Urusan Pilihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 , jadi total **28.767.609.482** dan realisasi Rp. **25.822.176.453** atau **89,76%** lebih jelas dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			FISIK		KEUANGAN
			%	Rp.	
5,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
5.1.1	Belanja Pegawai	6.116.830.333	100,00	5.930.007.274	96,95
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.116.830.333	100,00	5.930.007.274	96,95
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.623.618.104	100,00	2.591.236.924	98,77
		3.493.212.229	100,00	3.338.770.350	95,58

Adapun total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.116.830.333 dengan realisasi fisik 100% dan Realisasi Keuangan sebesar 3.338.770.350 atau 96,95%.

b. Belanja Langsung

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			%	Rp.	%
3.01...3.01.01.01.01	BELANJA LANGSUNG				
3.01...3.01.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	22.650.779.149	93,25	19.892.169.179	87,82
3.01...3.01.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.737.941.248	95,10	3.273.627.464	87,58
3.01...3.01.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	13.600.000	93,01	12.132.000	89,21
3.01...3.01.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	51.600.000	67,44	29.413.287	57,00
3.01...3.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.000.000	88,90	15.825.100	52,75
3.01...3.01.01.01.01.09	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.972.401.650	93,13	1.601.800.755	81,21
3.01...3.01.01.01.01.10	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.200.996	100,00	13.500.850	83,33
3.01...3.01.01.01.01.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.850.000	64,33	5.248.000	66,85
3.01...3.01.01.01.01.12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.000.000	100,00	99.988.760	99,99
3.01...3.01.01.01.01.13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80.559.000	92,55	76.122.500	94,49
3.01...3.01.01.01.01.15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000	100,00	2.805.000	93,50
3.01...3.01.01.01.01.17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	267.500.000	100,00	262.812.246	98,25
3.01...3.01.01.01.01.18	Penyediaan makanan dan minuman	37.985.000	52,89	16.720.000	44,02
3.01...3.01.01.01.01.19	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	132.000.000	100,00	116.207.950	88,04
3.01...3.01.01.01.02	Rapat Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	581.503.310	100,00	577.973.472	99,39
3.01...3.01.01.01.02.24	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	443.741.292	100,00	443.077.544	99,85
3.01...3.01.01.01.05	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	557.000.000	96,36	480.969.026	86,35
3.01...3.01.01.01.05.02	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	557.000.000	96,36	480.969.026	86,35
3.01...3.01.01.01.15	Sosialisasi peraturan perundang undangan	84.248.350	87,29	73.281.178	86,98
3.01...3.01.01.01.15.01	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	84.248.350	87,29	73.281.178	86,98
3.01...3.01.01.01.16	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	824.297.000	90,12	681.895.597	82,72
3.01...3.01.01.01.16.02	Program Pengelolaan kelautan Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	824.297.000	90,12	681.895.597	82,72
3.01...3.01.01.01.16.03	Kegiatan mitigasi dan adaptasi dan bencana, pencemaran dan dampak perubahan iklim*	2.347.086.000	98,89	2.299.593.052	97,98
3.01...3.01.01.01.16.04	Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*	779.110.000	98,81	765.903.590	98,30
3.01...3.01.01.01.17	Rencana Pengelolaan RPWP3K*	167.864.000	92,23	142.402.553	84,83
3.01...3.01.01.01.17.01	Program Pengembangan Kawasan Konservasi	1.400.112.000	99,73	1.391.286.909	99,37
3.01...3.01.01.01.17.03	Pengembangan kawasan konservasi perairan daerah	1.083.795.000	99,33	1.070.322.376	98,76
3.01...3.01.01.01.17.03	Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya ikan di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	864.305.000	99,17	851.727.376	98,54
		219.490.000	99,99	218.595.000	99,59

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
				Rp.	%
3.01...3.01.01.01.18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.803.080.659	99,44	2.714.823.360	96,85
3.01...3.01.01.01.18.01	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	1.983.200.660	99,55	1.955.527.834	98,60
3.01...3.01.01.01.18.02	Perencanaan pengembangan kawasan perikanan budidaya*	819.879.999	99,18	759.295.526	92,61
3.01...3.01.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	7.985.709.200	90,65	6.447.788.673	80,74
3.01...3.01.01.01.21.01	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	509.176.800	73,95	417.538.677	82,00
3.01...3.01.01.01.21.07	Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	178.653.400	83,34	159.872.333	89,49
3.01...3.01.01.01.21.08	Pengelolaan Sumberdaya Ikan	185.340.000	19,61	36.353.994	19,61
3.01...3.01.01.01.21.10	Pengembangan Pembangunan dan Pengelola Pelabuhan Perikanan	6.889.215.000	93,85	5.625.575.669	81,66
3.01...3.01.01.01.21.27	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perikanan Tangkap	223.324.000	94,88	208.448.000	93,34
3.01...3.01.01.01.22	Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Database Bidang Kelautan dan Perikanan*	558.224.000	73,25	368.982.572	66,10
3.01...3.01.01.01.22.01	Peningkatan Kualitas Perencanaan Bidang Kelautan dan Perikanan*	167.554.000	100,00	131.743.768	78,63
3.01...3.01.01.01.22.02	Peningkatan pendataan dan statistik	390.670.000	61,78	237.238.804	60,73
3.01...3.01.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.330.440.000	98,46	1.293.919.775	97,26
3.01...3.01.01.01.23.14	Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	893.320.000	98,91	881.504.175	98,68
3.01...3.01.01.01.23.15	Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan	437.120.000	97,53	412.415.600	94,35
3.01...3.01.01.01.25	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.338.957.692	80,08	1.186.966.106	88,65
3.01...3.01.01.01.25.01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	170.298.720	83,98	148.048.140	86,93
3.01...3.01.01.01.25.02	Pengawasan Sumberdaya Laut, Kelautan dan perikanan	533.745.000	76,62	462.767.956	86,70
3.01...3.01.01.01.25.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan	525.667.272	96,53	508.073.296	96,65
3.01...3.01.01.01.25.05	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	109.246.700	11,81	68.076.714	62,31
JUMLAH REALISASI 2018		28.767.609.482	94,69	25.822.176.453	89,76

Adapun total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 22.650.779.149 dengan realisasi fisik 93,25% dan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 19.892.169.179 atau 87,82%.

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan daerah

Proses penyusunan perencanaan pembangunan didasarkan pada dokumen RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD kemudian menjadi acuan RENSTRA dan RENJA SKPD.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Tabel. 4 Sarana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018

No.	Jenis & Nama Sarana Peralatan Kerja	Jumlah/Satuan	Kondisi Baik / Rusak
1	Pick Up	1 Unit	Baik
2	Sepeda Motor	16 unit	Baik
3	Speed Boat	2 Unit	Baik
4	Speed Boat P3D	1 Unit	Rusak
5	Jeep	1 unit	Baik
6	Kendaraan dinas bermotor lain-lain	6 unit	Baik
7	Global Positioning System	2 Unit	Baik
8	Mesin Ketik Manual Portable	1 Unit	Baik
9	Mesin Penghitung Uang	1 Unit	Baik
10	Mesin Fotocopy dengan kertas biasa double folio	1 unit	Baik
11	Peti Uang	1 unit	Baik
12	Alat Penghancur Kertas	2 unit	Baik
13	Mesin Absensi	1 unit	Baik
14	Meja Rapat	2 unit	Baik
15	Meja Makan	2 Unit	Baik
16	Tikar	3 Unit	Baik
17	Sofa	4 Unit	Baik
18	Mesin Penghisap debu	1 Unit	Baik
19	Lemari Es	6 Unit	Baik
20	AC Sentral	2 Unit	Baik
21	AC Split	9 Unit	Baik
22	Alat Dapur Lainnya	1 Unit	Baik
23	Tabung Gas	1 Unit	Baik
24	Televisi	7 Unit	Baik
25	Sound System	3 Unit	Baik
26	Dispenser	1 Unit	Baik
27	Handy Cam	3 Unit	Baik

28	Gorden /Tirai	6 Unit	Baik
29	Laptop	19 Unit	Baik
30	Hard Disk	8 Unit	Baik
31	Printer	15 Unit	Baik
32	Lemari Arsip	11Unit	Baik
33	Camera Film	3 Unit	Baik
34	Unintemuptible	5 Unit	Baik
35	Faximile	1 Unit	Baik
36	Generator	2 Unit	Baik
37	Personal Komputer	5 Unit	Baik
38	Meja Kerja	23 Unit	Baik
39	Teropong	2 Unit	Baik
40	Alat Ukur Lainnya	2 Unit	Baik
41	Printer	6 Unit	Baik
42	Electric Generating Set	1Unit	Baik
43	Scanner	1 Unit	Baik
44	Lemari Penyimpan	2 Unit	Baik
45	Mesin Ketik Elektronik	2 Unit	Baik
46	Rak Kayu	6 Unit	Baik
47	Lemari Kayu	6 Unit	Baik
48	Papan Visuil	1 Unit	Baik
49	Alat penghancur kertas	2 Unit	Baik
50	Tempat Tidur Besi/ Metal (Lengkap)	4 Unit	Baik
51	Kursi Rapat	1 Unit	Baik
52	Kursi Tamu	2 Unit	Baik
53	Kasur	8 Unit	Baik
54	AC Unit	1 Unit	Baik
55	P.C Unit	8 Unit	Baik
56	Peralatan Personal Komputer Lain- Lain	3 Unit	Baik
57	Proyektor + Attachment	3 Unit	Baik
58	Unintemuptible Powe Supply (UPS)	14 Unit	Baik
59	Peralatan Studio Visual	1 Unit	Baik
60	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain- Lain	1 Unit	Baik
61	Teropong Bidik Malam	1 Unit	Baik
62	Mesin Proses Lain- Lain	3 Unit	Baik
63	Gerobak Dorong	5 Unit	Baik
64	Batteray Charger	1 Unit	Baik
65	Bak air	2 Unit	Baik
66	Perkakas Dapur Tempa	1 Unit	Baik
67	Alat Timbangan Lain- Lain	1 Unit	Baik
68	Alat Processing Lain- Lain	6 Unit	Baik
69	Alat Pemeliharaan Tanaman	110 Unit	Baik
70	Papan Pengumuman	10 Unit	Baik
71	Meja Komputer	1 Unit	Baik
72	Mesin Potong Rumput	1 Unit	Baik

73	Camera Video	1 Unit	Baik
74	Self Supporting Tower	1 Unit	Baik
75	Worshop Accessories (Hand and Electronic Tools)	5 Unit	Baik
76	Perkakas Bengkel Lain- Lain	1 Unit	Baik
77	Alat Ukur Lainnya	1 Unit	Baik
79	Camera + Attachment	2 Unit	Baik

Tabel 4.1 Prasarana Perkantoran Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Jenis Prasarana Perkantor	Jumlah/ Satuan	Ket
1.	- Tanah dan bangunan (BBI)	1 Unit	Kab. Tana Tidung
	1) Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit	
	2) Bangunan Gedung Kantor Lain- Lain	1 Unit	
	3) Bangunan Bengkel Permanen	1 Unit	
	4) Bangunan Gedung Instalasi Lain- lain	1 Unit	
	5) Bangunan Gedung Lab. Permanen	1 Unit	
	6) Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain	1 Unit	
	7) Gedung Pos Jaga Permanen	1 Unit	
	8) Mess/ Wisma/ Bungalaw/ Tempat Peristirahatan Permanen	1 Unit	
	- Bangunan Air/ Irigasi	1 Unit	
	1) Terusan (kanal)	1 Unit	
	2) Bangunan Pengaman Sungai lain- lain	1 Unit	
	3) Dermaga	1 Unit	
2.	Bangunan/kantor	1 unit	Kota Tarakan
3.	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sei Batik		Sei Batik Kabupaten Nunukan
	1) Pembangunan Bangunan Genset 100 KVA PPI Sebatik	1 Unit	
	2) Belanja Modal Pembangunan Perbengkelan PPI Sebatik	1 Unit	
	3) Belanja Modal Pembangunan Pertokoan PPI Sebatik	1 Unit	
	4) Pembangunan Pos Jaga PPI Sebatik	1 Unit	
	5) Pembangunan Mess Operator Sebatik.	1 Unit	
	6) Pembangunan Wisma Nelayan PPI Sebatik	1 Unit	
	7) Pembangunan Jalan PPI Sebatik	1 Unit	
	8) Pembangunan Turap PPI Sebatik	1 Unit	
	9) Bangunan Gedung Kantor lain- lain	1 Unit	

10) Bangunan Gedung tempat Pertemuan Permanen	1 Unit 1 Unit	
---	------------------	--

Tabel 4.2 Pelabuhan Perikanan / Pangkalan Pendaratan Ikan

No	Nama PPI	Lokasi	Keterangan
1.	PPI Tengkeyu	Tarakan	
2.	PPI Sei Batik	Sei Batik Kabupaten Nunukan	

Tabel 4.3 Prasarana Budidaya Perikanan & Kelautan Prov.Kalimantan Utara

No	Uraian	Lokasi	Ket
	BBI Tanah Tidung	Kabupaten Tidung Pale	Aktif/Baik

Kondisi Prasarana BBI yang ada sudah cukup memadai baik dilihat dari fasilitasnya.

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada saat ini pada Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan pelabuhan perikanan khususnya di Tengkeyu II dan sumberdaya manusia yang masih minim.

Solusinya adalah

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pada layanan di pelabuhan tengkeyu II Tarakan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan tengkeyu II

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Tataran Pengambil Kebijakan.

Tataran pengambilan kebijakan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan penilaian ini difokuskan pada indikator:

No	Fokus	IKK	Capaian (%)
1	Produksi perikanan	Jumlah produksi ikan (ton)	124,45
2	konsumsi ikan (kg)	Rata-rata konsumsi/tahun/kapita	104,20
3	Ekspor Hasil Perikanan	Nilai Hasil ekspor Perikanan Provinsi Kaltara	201,22

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

1) Administrasi Umum (8 Aspek) IKK. 1.2

No (1)	ASPEK (2)	FOKUS (3)	NO (4)	IKK (5)	RUMUS (6)	JENIS DATA (7)	CAPAIAN KINERJA (8)	KETERANGAN (9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 9 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 5 program	55,55 %	Berdasarkan Program Nasional RKP 2018
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada SOP 1. Pembuatan Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP) 2. Pembuatan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) 3. Pembuatan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 4. Pembuatan Surat keterangan	12 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina

				Nelayan ANDON (SKNA)	teknis
				5. Pembuatan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKE)	
				6. Cara Budidaya Ikan yang Baik dan pembenihan ikan yang baik (CPTB)	
				7. Surat Rekomendasi Pelarangan peredaran obat kimia berbahaya (OIKB)	
				8. Pengendalian mutu Residu	
				9. Pembuatan rekomendasi surat izin lokasi reklamasi	
				10. Pembuatan rekomendasi surat izin pelaksanaan reklamasi	
				11. Pembuatan rekomendasi surat izin pemanfaatan WP3K	

2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 (1 : 1 X100 %)	100 %	Perda No.04 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 27 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 27 (27 : 27 X100 %)	100 %	
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas	5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada 4 Jabatan Fungsional - Penyuluh Perikanan Pertama	ada	Data Kepegawaian SKPD terakhir/updated Tahun 2018
			6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS SKPD, sebanyak 49 Aparatur - Total ASN Provinsi, sebanyak 3.483ASN	1,41%	Data Kepegawaian SKPD terakhir/updated Tahun 2018

	SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 27 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 27 org.	100 %	Data Kepegawaian terakhir/updated Tahun 2018
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepengkatan, sebanyak 27 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 27 jbt.	100%	Data Kepegawaian terakhir/updated Tahun 2018
		9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada 5 Dokumen Perencanaaa - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD - IKU - RKT	5 jenis dokumen	
		10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 11 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak	100%	Dokumen DPA Perubahan RKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.

6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100 %	RPJMD x 100 %	11 program	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100 %		Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018.
		Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100 %		- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. 28.767.609.482,00,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp.3.063.202.248.558,37,-	1,13%	DPA Perubahan anggaran APBD tahun 2018
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x		- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.9.600.789,99	33,37%	

7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau	- Ada - Laporan Bulanan - KIB 2018	Ada		
			17	Laporan keuangan SKPD	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Ada 4 dokumen pelaporan keuangan - Neraca - LRA - CALK - LO	Ada 4	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100 %	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 193.850.000,00 - total belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 28.767.609.482,00	0,67%		
			15	Besaran belanja pemeliharaan	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.193.850.000,00 - total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.10.731.489.150	1.80%	
				total belanja SKPD	100 %	9.00 Total Belanja SKPD, sebesar Rp.28.767.609.482,00,-			

8		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	asset SKPD	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 0	0 %		
	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas/Prasarana 1. Papan Pengumuman 2. Running Text 3. Leaflet	Ada 3	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.	

2) Tataran Pelaksana Kebijakan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja
 Urusan Pilihan IKK. 1.3

NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA (%)	KETETERANGAN
1	Produksi perikanan (ton)	$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan}}{\text{Target daerah}} \times 100\%$	93,54	Disertai data pendukung yang telah diperinci per 31 Des 2018
2	Konsumsi ikan (kg)	$\frac{\text{Jumlah konsumsi}}{\text{Target daerah (kg/kp)}} \times 100\%$	104,20	Disertai data pendukung yang telah diperinci per 31 Des 2018
3	Nilai Eksport Perikanan (US\$)	$\frac{\text{Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US$ tahun)}}{\text{Target Daerah}} \times 100\%$	201,22	Disertai data pendukung yang telah diperinci per 31 Des 2018

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018

Adapun program dan kegiatan sesuai Peraturan Presiden No. 79 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP tahun 2018) yang dilaksanakan oleh dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut ;

1. Program pengelolaan perikanan budidaya
 - a. Kegiatan pengolahan perbenihan ikan
Adapun output dari kegiatan ini adalah unit pembenihan yang bersertifikat CPIB (cara pembenihan ikan yang baik)
 - b. Kegiatan pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan
Adapun output dari kegiatan ini adalah lokasi budidaya yang dilakukan survaila dan/atau monitoring penyakit ikannya dan sampel produk perikanan budidaya yang diambil 96 persen bebas residu.
 - c. Kegiatan pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan
Adapun output dari kegiatan ini adalah unit pembudidaya ikan bersertifikat CBIB skala kecil dan skala besar.
- 2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
Adapun Output dari kegiatan ini adalah pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi melalui rapat teknis, bimtek dan koordinasi.
 - b. Kegiatan pengelolaan Perizinan Pusat dan Daerah
Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya pelayanan perizinan
 - c. Kegiatan nelayan yang terlindungi
Adapun output dari kegiatan ini adalah dokumen identifikasi calon penerima asuransi nelayan.
 - d. Kegiatan rumah tangga perikanan yang melakukan diversifikasi usaha (base line)
Adapun output dari kegiatan ini adalah pelaksanaan diversifikasi usaha keluarga nelayan melalui bimbingan teknis dan paket bantuan.

3. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan Kegiatan
 - a. Kegiatan logistik hasil kelautan dan perikanan
Adapun output dari kegiatan ini adalah sosialisasi pedoman pemetaan dan pemantauan serta monitoring dan evaluasi ke daerah
 - b. Kegiatan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
Adapun output dari kegiatan ini adalah promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri (pameran)
 - c. Kegiatan pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan
Adapun output dari kegiatan ini adalah sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi UPI
4. Program Pengawasan pengelolaan SDKP
 - a. Pemantauan dan operasi armada
Adapun output dari kegiatan ini adalah penyediaan logistik speed boat dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)

BAB V PENUTUP

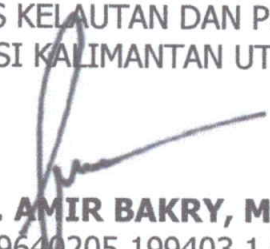
LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini disusun sebagai laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah disampaikan kepada Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Hasil pembangunan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara pada hakikatnya merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha khususnya sektor kelautan dan perikanan .

Pencapaian target pembangunan tahun 2018 ini, masih perlu ditingkatkan kembali. Kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018 tentu akan menjadi bahan evaluasi serta sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini disusun, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Ir. H. AMIR BAKRY, MP
NIP. 19640205 199403 1 01